

MENCARI FORMAT BARU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MASYARAKAT PLURAL

Oleh : Muqowim*

Abstrak: Pendidikan merupakan proses yang sangat penting dilakukan dalam memberdayakan masyarakat. Banyak dimensi yang dapat dicapai melalui proses pendidikan seperti perubahan sikap mental dan taraf intelektual masyarakat, termasuk membangun semangat pluralisme. Dalam masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, dipandang sangat signifikan mencari format pendidikan Islam yang bernuansa plural yang akan bermuara pada terbangunnya sikap saling menghargai, toleran, dan humanis.

Kata kunci: Pendidikan Islam, format baru, plural, toleran.

Pendahuluan

Salah satu ciri pokok masyarakat abad 21 adalah lahirnya suatu masyarakat mega kompetisi. Gelombang globalisasi yang melahirkan dunia terbuka telah mengubah semua aspek kehidupan manusia baik di dalam kehidupan perdagangan, politik, sosial, budaya serta hak-hak dan kewajiban manusia. Seluruh kekuatan ini melahirkan apa yang disebut dengan kesadaran global, *global consciousness*. Keadasaran global yang mehumatkan manusia menjadi partikel-partikel yang tidak berarti ini menuntut sumbangan dari setiap individu dalam membina suatu masyarakat baru yang lebih baik. Masyarakat tersebut merupakan hasil dari presentasi dan kreatifitas manusia yang muncul karena adanya kompetisi. Ini berarti menuntut lahirnya manusia-manusia berkualitas agar bisa bersaing di dalamnya. Kualitas ini bisa dilihat dari segi fisik, intelektual, sosial dan moralnya. Aspek-aspek tersebut harus dikembangkan secara seimbang dan terpadu.

Tantangan era globalisasi di atas menjadi perhatian setiap orang di seluruh penjuru dunia tanpa membedakan agama, jenis kelamin, warna kulit, bahasa ataupun etnis. Dengan demikian, umat Islam tanpa terkecuali harus mampu mengatasi problem tersebut. Hal ini, dari kaca mata teologis, sebenarnya merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk membuktikan bahwa agama Islam sebagai *rahmatan li al-'alamim*, umat

Islam sebagai *khairu ummah*, dan *al-Islam ya'lu wala yu'la alaih*. Pada kenyataannya ketiga terma tersebut masih sebatas pada slogan abstrak dan utopis yang belum membumi.

Untuk konteks Indonesia, problem yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks dan rumit seiring dengan belum adanya tanda-tanda berakhirnya krisis ekonomi yang berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan, seperti politik, sosial, budaya, termasuk pendidikan. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan munculnya problem desintegrasi bangsa dan berbagai kasus kerusuhan dan kekerasan massa yang lebih bernuansa SARA. Tentu saja, problem tersebut mempunyai reduksi dalam sikap dan perilaku generasi bangsa Indonesia di masa depan. Pada dasarnya, kasus kerusuhan dan kekerasan tersebut terjadi karena berawal dari adanya perbedaan cara pandang sepihak yang menganggap pihak lain sebagai lawan, keliru, dan harus dilawan.

Secara normatif, tidak satupun ajaran agama yang mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan tindak kekerasan (*violence*) dan kerusuhan (*unrest*) terhadap pengikut agama lain di luar kelompoknya, atau bahkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap ajaran dalam satu agama. Selain itu, secara budaya, ajaran agama juga mengajarkan umatnya untuk saling mengenal satu sama lain (*ta'aruf*) karena adanya perbedaan latar belakang seperti budaya, bangsa, bahasa dan jenis kelamin. Akan tetapi, secara empiris-historis-faktual, sesekali—untuk tidak mengatakan seringkali, dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan dalih agama (Abdullah: 2000: 2). Untuk menyebutkan beberapa kasus kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi di Indonesia adalah mulai dari kasus Situbondo, Pekalongan, Maluku hingga Sampit. Sedangkan untuk kasus di luar negeri seperti India, Irlandia, dan bekas Yugoslavia. Memang agak sulit memisahkan secara tegas (*clear-cut*) berbagai kasus tersebut antara yang bermotivasi keagamaan, dengan non-keagamaan, seperti ekonomi, sosial, dan politik, namun ketika simbol-simbol keagamaan digunakan, maka kasus tersebut semakin ruwet dan bersifat *massive-emosional*.

Untuk kasus di Indonesia, pluralitas agama, etnis, dan bahasa sangat terasa dan tampak jelas, sehingga kasus kerusuhan atau kekerasan menjadi semakin kompleks. Kondisi ini sangat dirasakan oleh berbagai pihak, seperti para tokoh masyarakat, politisi, sampai orang tua di rumah. Karena itu, untuk

* Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang sedang mengikuti Program Doktor di institusi yang sama dengan spesialisasi Pemikiran Pendidikan Islam.

mengatasi persoalan, atau paling tidak untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa di wilayah lain diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan menuntut berbagai berpihak sadar untuk mencermati, mengevaluasi, dan merekonstruksi metodologi dan pola pengkajian agama, baik yang terjadi di luar lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Hal ini mendesak dilakukan karena melalui proses pendidikan dalam arti luaslah, terjadi sosialisasi dan internalisasi nilai dan perspektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah generasi yang mewariskan nilai dengan cara yang keliru akan mempunyai dampak panjang (*repercussion*) terhadap pola perilaku generasi berikutnya. Karena itu, pola penanaman nilai melalui proses pendidikan menjadi penting dilakukan.

Tulisan ini difokuskan pada pembahasan pola internalisasi nilai di lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah (masyarakat) multikultural dan multireligius. Untuk membahas persoalan ini perlu mengelaborasi secara sekilas paradigma pendidikan yang selama ini terjadi dan dilakukan di Indonesia. Setelah itu, kajian ini lebih ditekankan pada perlunya *shifting paradigm* dan kerangka berpikir dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai agama dan budaya melalui lembaga pendidikan sekolah. Hal ini menuntut adanya peninjauan secara kritis terhadap berbagai aspek yang terkait dengan dunia pendidikan, seperti kurikulum, metodologi pengajaran, dan tenaga pengajar.

Tantangan Masyarakat Modern

Kehidupan modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan di bidang ini juga yang menandai munculnya era baru yang dikenal dengan era informasi dan komunikasi. Berbagai penemuan mutakhir dalam bidang ini telah mengantarkan kehidupan modern pada era dunia-tanpa-batas (*borderless*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan era global. Dunia seakan menjadi sempit dan tanpa sekat. Kejadian di belahan bumi lain dapat dilihat dan diketahui dalam waktu yang bersamaan melalui perangkat teknologi digital seperti satelit ataupun internet.

Tidak disangsikan lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa umat manusia pada dunia baru. Zaman baru ini tentu saja mempunyai sisi positif dan sisi negatif sekaligus. Karena itu, orang

yang hidup dalam era ini harus padai-pandai menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Menurut Tilaar (1984: 40-41), ada empat aspek positif yang dapat diambil dari kehidupan global ini. *Pertama*, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang informasi serta inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. *Kedua*, perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan IPTEK. *Ketiga*, kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara. Dan *keempat*, meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.

Selain sisi positif yang muncul dari era global ini, pada saat yang sama muncul dampak negatif, setidaknya tantangan, yang harus diantisipasi oleh setiap bangsa agar tidak menimbulkan kerugian. Persoalan yang harus dicermati sebagai dampak arus globalisasi. Tilar (1984: 44-45) menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga hal dampak arus globalisasi. *Pertama*, dengan tidak adanya sekat antara bangsa satu dengan yang lain, eksistensi budaya bangsa akan berpengaruh kepada bangsa yang lain. *Kedua*, dengan kondisi ini menyebabkan luntuhnya identitas masing-masing bangsa, sebab setiap negara berada dalam satu kondisi tanpa batas, sehingga mengaburkan identitas masing-masing negara. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari sisi negatif yang pertama dan kedua, maka semakin lama kesadaran akan wawasan negara/bangsanya sendiri semakin luntur, untuk tidak mengatakan hilang.

Berbeda dengan Tilaar, Majid (1999: 99-102), mengutip pendapat Lewis, di antara tantangan modernitas yang paling nyata adalah persoalan toleransi dan pluralisme. Bagi umat Kristen maupun muslim, toleransi adalah kebajikan dan nilai baru, sedangkan intoleransi adalah kejahatan baru. Pada sebagian besar sejarah kedua komunitas itu, toleransi tidak dipandang sebagai sesuatu yang bernilai, dan intoleransi juga tidak dikedam. Hingga masa yang relatif modern, Eropa yang Kristen itu sendiri juga tidak menghargai toleransi atau mempraktikkannya, dan mereka juga tidak mengecam ketiadaannya di tempat-tempat lain. Tuduhan yang seringkali dialamatkan kepada Islam bukanlah bahwa ajaran-ajarannya dipaksakan dengan kekerasan –sesuatu yang dilihat sebagai hal yang normal dan alamiah belaka –melainkan bahwa ajaran-ajaran itu palsu. Demikian juga di pihak kaum Muslimin: klaim akan

toleransi, yang kini banya terdengar dari para apolog Muslim dan –lebih khusus lagi—dari para apolog pembela Islam, selalu merupakan hal baru dan asal-usulnya berasal dari laut (Lewis: 1987: 3-4).

Lebih lanjut Lewis menunjukkan bahwa generasi Islam awal cenderung lebih toleran jika dibandingkan dengan generasi Islam yang lebih belakangan. Tulisan Lewis tentang fenomena ini perlu dicermati berikut. Bahwa pada masa-masa awal, banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen dan Yahudi. Meski menganut agama yang berbeda, mereka membentuk masyarakat tunggal yang di dalamnya perkawanan antar pribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lain kegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum. Kerja sama kultural ini tampak dalam banyak cara. Kita, misalnya memiliki kamus-kamus biografis yang memperlihatkan dokter-dokter ternama. Meskipun ditulis oleh Muslim, karya ini memasukkan nama-nama dokter Muslim, Kristen, dan Yahudi, sekaligus tanpa diskriminasi. Dari biografi yang jumlahnya sangat banyak ini, kita bahkan dapat menyusun semacam prosopografi tentang profesi kedokteran –untuk menelusuri garis hidup beberapa ritus dokter praktik di dunia Islam. Dari sumber-sumber ini kita mendapat kesan yang sangat jelas mengenai upaya-upaya bersama. Di rumah sakit maupun di tempat praktik pribadi, para dokter yang berasal dari ketiga agama di atas bekerja sama sebagai mitra atau asisten, saling membaca karya yang ditulis pihak lain, saling menerima sebagai murid dan guru. Tidak ditemukan jenis pemisahan yang umum ditemukan di dunia Kristen Barat pada masa itu atau di dunia Islam pada masa-masa belakangan (Lewis: 1987: 3-4).

Menurut Madjid, masalah Islam *vis-à-vis* pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri dengan dunia modern. Hal ini pada gilirannya melibatkan masalah bagaimana mereka memandang dan menilai sejarah Islam, dan bagaimana mereka melihat dan menilai perubahan dan keharusan membawa masuk nilai-nilai Islam normatif dan universal ke dalam dialog dengan realitas ruang dan waktu (Woodward: 1996: 103).

Problem di atas semakin rumit ketika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia sebagai paling majemuk dalam hal etnis, agama, bahasa, dan golongan di muka bumi. Kondisi yang demikian, di satu sisi, sebenarnya merupakan potensi besar yang positif, dikelola, dan dimanfaatkan bagi

kemaslahatan bangsa. Namun, di sisi lain, heterogenitas tersebut justru menjadi sumber permasalahan yang terjadi di negara ini. Untuk menyebut beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, seperti kasus Sampit, Palangkaraya, Poso, Maluku, beberapa kasus peledakan, dan kasus tawuran antar pelajar, muncul dari keragaman di atas. Masalahnya adalah bagaimana menjadikan kemajemukan itu menjadi sebuah potensi yang dapat dikelola bersama sehingga menjadi kekuatan yang dapat dinikmati seluruh bangsa.

Untuk konteks keberagamaan, problem yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya masalah hubungan antar agama, namun juga hubungan intern agama, dan hubungan agama dengan pemerintah. Ketiga hubungan tersebut jika tidak dikelola secara baik sama-sama berpotensi memunculkan konflik dan kekerasan. Pemahaman agama secara kaku sering berakibat pada penilaian secara keliru terhadap agama lain yang dipeluk oleh sesama masyarakat Indonesia. Begitu juga, meskipun sama-sama berpegang pada ajaran agama yang sama, ketika tidak ada rasa saling menghargai dan menghormati munculnya pemahaman dan penafsiran berbeda terhadap sumber ajaran agama yang bersifat global, juga menjadi penyebab timbulnya kekerasan beragama. Akhirnya, ketika hubungan agama dan negara tidak ditempatkan pada posisi sebenarnya, maka ia juga berakibat pada ketidakharmonisan hubungan yang berujung pada rasa saling mencurigai antara pemeluk agama (*believer*) dengan pemerintah (*ruler*).

Mencari Islam yang “Benar”

Dalam buku *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Amin Abdullah (1996) membagi studi Islam ke dalam dua kategori, yakni Islam normatif dan Islam historis. Yang pertama menunjukkan pada pemahaman Islam *das Sollen*, Islam yang seharusnya dan lebih melihat Islam sebagai doktrin wahyu, sedangkan yang kedua mengacu kepada Islam *das Sein*, yakni Islam pada kenyataannya yang dapat dilihat dalam konteks tataran sejarah. Gagasan ini senada dengan apa yang dilontarkan oleh Lewis tentang *Islam Ideal* yang bersumber pada Qur’an dan al-Hadis Nabi Muhammad dan Islam historis yang sudah menyejarah (Rahardjo: 1998: vii).

Pendapat Amin mengenai konsep historis dapat dikelompokkan ke dalam dua konsep tradisi, yakni konsep tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*) yang dintrodisir oleh seorang antropolog

Amerika Redfield (1956: 70), yang kemudian banyak digunakan oleh antropolog dalam studi mereka sendiri. Kajian Geertz (1960) dalam *The Religion of Java* yang kemudian menjadi *masterpiece*-nya juga menggunakan kerangka konsep *great tradition* dan *little tradition* ini.

Konsep tersebut menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban terdapat dua macam tradisi yang dapat dikelompokkan sebagai *great tradition* dan *little tradition* (Pranowo: 1998: 3). Yang pertama merupakan tradisi dari mereka yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit. Sedangkan yang kedua sebagai tradisi dari sebagian orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam tradisi yang mereka miliki. Tradisi dari para filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah tradisi yang ditanamkan dan diwariskan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi orang kebanyakan adalah tradisi yang sebagian diterima dari pendahulu dengan apa adanya (*taken for granted*) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.

Islam sebagai gejala budaya juga menjadi perhatian Grunebaum. Dua kelompok tradisi yang dikemukakan oleh Redfield di atas identik dengan konsep *the Islamic high culture* dan *the Islamic local culture* yang dikemukakan oleh Grunebaum. Yang pertama menggambarkan adanya kesatuan dalam Islam, sedangkan yang kedua menggambarkan adanya keragaman Islam yang tercermin melalui budaya lokal (Grunebaum: 1955). Istilah yang digunakan Grunebaum ini mengingatkan pada terma yang digunakan oleh pemikir sosial asal Prancis, Ernest Gellner tentang Islam rendah (*low Islam*) dan Islam tinggi (*high Islam*) (Rahardjo: viii). Yang pertama lebih bersifat universal, sedangkan yang kedua bersifat partikular. Istilah Islam rendah bukan berarti merendahkan Islam yang dianut oleh lapisan bawah kaum Muslim. Istilah tersebut hanya berkaitan dengan bentuk ekspresi kebudayaan.

Gellner menggunakan kedua terma tersebut untuk menggambarkan dua model beragama di kalangan umat Islam. Islam tinggi merupakan pola budaya yang dianut oleh lapisan cendekiawan dan kelas menengah. Nilai-nilai yang menjadi acuan atau pegangan adalah ketaatan pada aturan, rasionalitas dan keterpelajaran. Mereka juga bersikap skriptualis (berpedoman pada teks atau interpretasinya secara harfiah kontekstual), puritan, literal, hidup sederhana, egaliter dan eksatik. Sebaliknya, budaya Islam rendah dianut oleh

masyarakat pedesaan dan masyarakat yang lebih sederhana. Cara hidup mereka lebih mementingkan unsur magis, ekstase, pemujaan kepada wali atau orang suci, tertarik kepada praktik mistik dan sering menggunakan ayat-ayat suci sebagai cara penyembuhan.

Berbagai versi Islam yang dikemukakan para tokoh di atas hanya untuk menggambarkan betapa banyak corak keislaman umat Islam ketika ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dipahami oleh para pemeluknya. Keragaman ini muncul karena cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh mereka berbeda. Hal ini sangat tergantung pada lokal dan tempat masing-masing pemeluk. Bila dicermati, sebenarnya munculnya fenomena keragaman dalam keberagaman ini lebih mencuat pada tataran historis, yakni ketika Islam normatif dipahami umatnya menurut kultur masing-masing. Pengertian kultur ini mengacu pada *academic background* dan *social setting* umat Islam.

Berkaitan dengan pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya tersebut, Jabali (2001: 151-168) menyatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya adalah yang diketahui oleh Allah sendiri. Karena agama Islam adalah untuk umat manusia, maka Allah menurunkan al-Qur'an yang berisi ajaran yang berasal dari-Nya. Untuk menyampaikan kandungan al-Qur'an ini, nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah. Islam yang ditampilkan oleh Nabi telah mengalami reduksi yang pertama. Bagaimanapun sempurnanya Nabi Muhammad, ia tetap sebagai manusia yang tidak dapat menyamai kesempurnaan Allah. Karena itu, pengetahuan dan kehendaknya tentu tidak sama persis dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Kemudian, ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu diterima dan dilaksanakan oleh generasi berikutnya, yakni para imam mazhab, tentu apa yang diamalkan dan dikehendaki oleh Nabi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para imam tersebut, sebab mereka memahami melalui dua sumber, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam konteks ini, Islam mengalami reduksi yang kedua, sebab pemahaman para imam mazhab terhadap Islam tidak langsung diperoleh dari Allah sebagaimana yang dialami oleh Nabi, namun didasarkan al-Qur'an dan sabda dan perilaku Nabi.

Selanjutnya Jabali menyatakan bahwa ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran Nabi sebelum mengalami reduksi. Inilah yang harus diungkap oleh umat Islam. Berbagai macam tafsiran al-Qur'an, dan berbagai macam

mazhab ditulis dalam rangka menangkap kesempurnaan ajaran Islam tersebut. Manusia, sebagai makhluk yang tidak sempurna tentu tidak mampu menangkap sepenuhnya kesempurnaan ajaran Tuhan. Di sinilah justru letak esensi dari beragama, yakni ada dinamika, ada pencarian yang terus menerus (*on going quest*), dan proses menjadi yang tanpa batas (*timeless process of becoming*). Makna dari semua ini adalah bahwa keragaman pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan (*unavoidable*) yang tidak mungkin dihindari. Keragaman ini muncul karena sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman yang dimiliki tentang agama Islam. Karena itu, hal tersebut harus disikapi dan disadari oleh setiap umat Islam; bahwa pemahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap ajaran agama Islam harus dilihat sebagai rahmat Allah yang perlu disyukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Kasus pemahaman terhadap ajaran agama secara internal di atas dapat dianalogikan dengan pemahaman seseorang terhadap keragaman agama dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Bahwa berbagai kasus kekerasan bermuansa agama dan etnis lebih disebabkan oleh kurangnya menghargai dan menghormati ajaran agama dan budaya etnis lain. Tidak adanya penghormatan dan penghargaan terhadap pihak lain lebih disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan yang dimiliki dan belum adanya upaya untuk lebih mengenal tentang pihak lain tersebut. Karena itu, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar bahwa perbedaan dalam hal apapun, baik dari segi agama, bahasa, etnis, warna kulit, dan sebagainya merupakan *sumatullah* yang perlu dikelola dengan baik. Berkaitan dengan permasalahan tersebut yang muncul dari perbedaan cara pandang, baik dalam hal agama atau etnis itulah, maka peninjauan ulang terhadap pola pendidikan yang selama ini dipahami dan dilaksanakan perlu diberikan.

Pertunya Paradigma Baru dalam Pendidikan Islam

Berbagai masalah yang terjadi di kalangan internal umat Islam di atas menjadi keprihatinan bersama umat Islam. Fenomena ini seakan menggambarkan betapa rapuhnya semangat saling menghormati, saling menghargai, dan sikap menerima perbedaan. Selain itu, klaim kebenaran (*truth claim*), yakni merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain sebagai tindakan salah dan dosa, di kalangan pemeluk Islam masih terasa. Apalagi

jika hal ini dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi umat Islam dalam era global yang semakin rumit dan kompleks. Persoalan internal umat menjadi penghalang untuk bersaing dengan peradaban bangsa lain.

Persoalan tersebut mengingatkan kita pada proses pendidikan yang selama ini dilakukan umat Islam, sebab sikap dan karakter seseorang merupakan akumulasi pengetahuan sebagai hasil dari proses belajar. Seorang anak dalam makna yang luas, digambarkan dalam sebuah sajak Dorothy Law Nolte yang dikutip Rakhmad, banyak belajar dari kehidupan yang dilewatinya. Puisi tersebut berbunyi:

If a child lives with criticism, he learns to condemn.

If a child lives with hostility, he learns to fight.

If a child lives with ridicule, he learns to be shy.

If a child lives with shame, he learns to feel guilty.

If a child lives with tolerance, he learns to be patience.

If a child lives with encouragement, he learns to be confidence.

If a child lives with praise, he learns to appreciate.

If a child lives with fairness, he learns to be justice.

If a child lives with security, he learns to have faith.

If a child lives with approval, he learns to like himself.

If a child lives with acceptance dan friendship, he learn to finf love in the world (Rakhmad: 1996: 2)

Menurut Rakhmad, orang belajar dari komunitas yang dekat dengannya. Yang paling banyak mempengaruhi pribadi seseorang adalah orang yang mempunyai makna baginya, meminjam istilah Mead dengan *significant others* (Rakhmad: 101). Ketika seseorang masih kecil, maka *significant others* adalah orang tua, saudara, dan orang-orang yang tinggal serumah. Dewey dan Humber menyebut istilah tersebut dengan *affective others*, yakni orang lain yang dengan mereka seseorang mempunyai ikatan emosional. Dari merekalah seseorang membentuk konsep tentang dirinya. Senyum, pujian, penghargaan, dan pelukan menyebabkannya menilai diri sendiri secara positif. Sebaliknya, ejekan, cemoohan, dan hardikan membuat seseorang memandang dirinya secara negatif. Dalam perkembangan selanjutnya *significant others* ini tentu mengalami perubahan. Hal ini karena lingkungan pergaulan anak mulai meluas. Dari lingkup keluarga ke sekolah

dan masyarakat sekitarnya. Karena itu yang membentuk karakter seseorang juga sangat variatif tergantung pada lingkungan tempat orang bergaul.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana konsep dan proses pendidikan yang selama ini dilakukan oleh umat Islam sehingga menjadikan mereka memiliki karakter seperti di atas. Meskipun harus diakui bahwa secara normatif-konseptual konsep pendidikan Islam sangat ideal, namun dalam pelaksanaannya, konsep tersebut tidak berjalan optimal dan kurang fungsional dan *unworkable*. Malah, pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dari yang diidealkan.

Dengan perspektifnya masing-masing, banyak pakar memberikan definisi tentang pendidikan Islam. Al-Qardhawi (1980: 39), misalnya berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Sedangkan Langgulung memberikan definisi pendidikan Islam sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat (Langgulung: 1980: 94). Dari pengertian ini tampak bahwa pendidikan Islam ada proses pemindahan nilai-nilai Islam. Tentunya nilai-nilai ini apa yang terkandung di dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijihad para ulama.

Dari pengertian di atas terkandung adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan Islam. Terbentuknya kepribadian yang utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam. Sebenarnya tujuan pendidikan Islam dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni tujuan antara dan tujuan akhir yang lebih jauh (Azra: 1998: 6-7). Tujuan antara menyangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi anak didik, masyarakat maupun lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan antara diukur melalui tingkat keberhasilannya.

Dalam kerangka tujuan antara tersebut al-Syaibani menyebutkan adanya tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan Islam (Al-Syaibani: 1979: 399). *Pertama*, tujuan individual yang berkaitan dengan individu, pelajaran dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa yang

berkaitan dengan individu tersebut berupa perubahan tingkah laku, aktifitas upaya perubahan, proses pencapaiannya, dan berbagai persiapan yang akan dilakukan. *Kedua*, tujuan sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi dan sebagai suatu aktifitas dalam masyarakat.

Ketika membandingkan pendidikan Islam dengan pendidikan secara umum (Barat), Azra menyebutkan ada tujuh karakteristik yang dimiliki pendidikan Islam (Azra: 12-14). *Pertama*, penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran Islam mewajibkan umatnya mencari ilmu pengetahuan. *Kedua*, pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu yang telah dikuasai harus diberikan dan dikembangkan kepada orang lain. *Ketiga*, penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. *Keempat*, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut hanyalah untuk pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umum. *Kelima*, penyesuaian pada perkembangan anak. *Keenam*, pengembangan kepribadian. Pengembangan aspek ini berkaitan dengan seluruh nilai dan sistem Islam, sehingga setiap peserta didik diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dan *ketujuh*, penekanan pada amal saleh dan tanggung jawab. Setiap peserta didik diberikan semangat dan dorongan untuk mengamalkan ilmunya sehingga benar-benar bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks *das sein* pendidikan Islam banyak dipertanyakan tentang peran yang seharusnya diemban, terutama peran yang harus dimainkan dalam masyarakat global dan plural. Yang sering terjadi justru ketika terjadi kasus kekerasan atau kerusuhan massa adalah di wilayah basis masyarakat muslim. Meskipun secara teoritik, konsep pendidikan Islam sangat ideal seperti diuraikan di atas, namun ketika dilihat dari segi *out put*-nya seakan konsep ideal tersebut tidak membekas. Kritik semacam ini wajar, jika dikaitkan dengan realitas umat Islam yang menunjukkan kondisi berbeda dengan yang dikonseptualisasikan. *Discrepancy* antara idealis dan realitas ini dapat dilihat dari segi minimnya penguasaan iptek di kalangan umat Islam. Selain itu, munculnya realitas perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang berawal dari persoalan *khilafiyah* dan perbedaan kepentingan.

Kondisi di atas disebabkan oleh banyak faktor. Di antara penyebab yang dapat penulis identifikasi adalah adanya pemahaman sempit tentang pendidikan Islam, baik secara kelembagaan maupun muatan ilmu yang menjadi cakupannya. Secara institusional, pendidikan Islam lebih dipahami sebagai pendidikan yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah ataupun madrasah saja. Sekolah-olah institusi lain seperti keluarga yang merupakan bentuk pendidikan in-formal dan masyarakat yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan non-formal, seperti majelis ta'lim, karang taruna, dan sebagainya, bukan menjadi bagian dari lembaga dalam pendidikan Islam.

Pemahaman yang keliru tentang muatan ilmu yang seharusnya diberikan dalam pendidikan Islam juga menjadi penyebab tidak fungsionalnya proses pendidikan Islam. Sebagian umat Islam beranggapan bahwa ilmu yang seharusnya dipelajari dan diajarkan dalam pendidikan Islam adalah ilmu-ilmu agama dalam pengertian sempit seperti fikih, tafsir, dan hadis (Azra: 1999: ix). Hanya ilmu-ilmu semacam inilah yang dianggap dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Disiplin ilmu lain seperti sains dan teknologi tidak diperhatikan karena dianggap sebagai ilmu profan yang belum tentu bisa mengantarkan seseorang masuk surga, bahkan lebih banyak moderatnya.

Manurut Azra pendapat sebagai umat Islam tentang supremasi ilmu-ilmu agama di atas menimbulkan dampak yang amat substansial, bukan saja pada perkembangan ilmu pengetahuan Islam, namun juga bagi peradaban Islam secara keseluruhan (Azra: xii). Secara keilmuan, perkembangan semacam ini menciptakan dikotomisasi dan antagonisasi berbagai cabang ilmu. Padahal, sebagaimana diungkap oleh Nasr, berbagai cabang ilmu atau bentuk-bentuk pengetahuan dipandang dari perpektif Islam pada akhirnya adalah satu. Dalam Islam tidak dikenal adanya ilmu agama dan ilmu profan. Tidak ada dikotomi ilmu dalam pengetahuan tentang "Yang Maha Tunggal," Allah swt (Nasr: 1976 :13-14).

Pada era globalisasi, proses pendidikan Islam seperti diuraikan tersebut semakin mendapat tantangan yang cukup berat, terutama jika dikaitkan dengan situasi masyarakat yang sangat majemuk (*plural*) yang menuntut adanya kedewasaan berpikir dan saling menghargai pendapat orang. Tampaknya jika pendidikan Islam ingin kontekstual dengan

perkembangan zaman, maka paradigma pendidikan yang selama ini dikembangkan harus diubah. Menurut Mastuhu, perubahan paradigma yang dimaksud adalah mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar pemecahan masalah, dari hafalan, ke dialog, dari pasif ke *heuristic*, dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi, dari mekanis ke kreatif, dari memandangi dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandangi dan menerima ilmu dalam dimensi proses, dan fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, namun mengolah dan mengembangkan hati (*moral*) dan keterampilan (Mastuhu: 1999: 49).

Berkaitan dengan perubahan paradigma dalam pendidikan tersebut, Djohar (1999: 211-212), dengan mengutip Peter Schwarts dan James Oglivy, menyatakan bahwa perubahan paradigma yang dimaksud dalam dunia pendidikan adalah dari simplisitas ke kompleksitas, dari hirarki ke heterarki, dari mekanik ke holografik, dari determinet ke indeterminet, dari *linearly causal* ke *mutual causal*, dari assembly ke morfogenesis, dan dari objektif ke perspektif.

Sementara itu, untuk menanggapi masyarakat modern yang semakin kompleks dan plural agaknya paradigma pendidikan yang ditawarkan oleh UNESCO perlu dicermati oleh para pelaku pendidikan Islam. Paradigma yang ditawarkan tersebut adalah bahwa proses pendidikan bukan hanya mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk *learning to be* (menjadi) saja, namun proses pendidikan juga hendaknya dapat membentuk peserta didik untuk *learning to live together* (hidup bersama) dengan orang lain (Tilaar: 69). Tiga paradigma pertama cenderung mengoptimalkan peserta didik sebagai individu, baik yang menyangkut ranah kognitif, afektif maupun psiko-motoris. Sedangkan paradigma yang keempat adalah upaya mengoptimalkan potensi sosial. Bahwa manusia hidup tidak sendirian. Di sekitarnya banyak orang yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia meskipun berbeda jenis kelamin, agama, warna kulit ataupun etnis. Inilah sebenarnya menjadi tantangan paling serius bagi pendidikan Islam pada era globalisasi.

Ketika proses pendidikan Islam sudah diarahkan untuk membentuk individu muslim yang mempunyai kesalehan individual dan kesalehan sosial, maka berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam relatif mudah dipecahkan

dan kompleksitas persoalan modern beserta masyarakat mejemuknya dapat dijadikan sebagai sebuah potensi yang harus dikelola dengan baik. Tentu semua ini sepenuhnya kembali pada umat Islam sendiri, mau tidak merubah pola pikir yang selama ini sudah mentradisi secara turun temurun.

Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parathazam dari Jnana-Deepa Vidyapeeth, India, tentang komunalisme dan konflik antar agama, ada tiga kesimpulan yang dapat diperoleh. *Pertama*, kebanyakan kasus konflik antar umat beragama terjadi karena diprovokasi dan disulut oleh para politisi demi kepentingan suara dalam pemilihan umum. *Kedua*, semakin terdidik umat beragama, semakin terbuka dan toleran sikap mereka. *Ketiga*, semakin mereka mengenal agama-agama lain, semakin terbuka dan toleran sikap umat beragama (Banawiratma 1998: 99). Meskipun penelitian itu ruang lingkupnya terbatas, namun ketiga kesimpulan yang dihasilkan cukup menarik untuk dicermati.

Kesimpulan yang pertama menunjukkan betapa sulitnya memisahkan persoalan agama dengan non-agama, seperti politik. Menggunakan baju agama dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari dukungan politik tingkat akar rumput (*grassroot*) daripada menggunakan politik murni, terlebih dalam masyarakat yang tingkat pendidikan dan wawasannya relatif rendah. Sementara itu, yang dapat dipelajari dari kesimpulan yang kedua adalah bahwa hanya masyarakat yang kurang terdidiklah yang relatif mudah terprovokasi dan terjerumus ke dalam tindakan kekerasan yang bermuansa SARA, sementara bagi masyarakat yang terdidik tidak mudah terperosok ke dalam konflik-konflik tersebut. Namun demikian, tidak berarti semua orang yang terdidik bukan sebagai penyebab munculnya kasus-kasus kerusuhan berbaju agama. Malah, sebagaimana kesimpulan yang pertama, orang terdidik yang mempunyai kepentingan politik tertentu justru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus-kasus kerusuhan. Karena itu, yang dimaksudkan dengan kesimpulan yang keduanya tentu saja bagi mereka yang mempunyai kesadaran publik akan pentingnya hidup secara damai dengan "other", baik dari segi agama, budaya, etnis, ataupun bahasa. Adapun kesimpulan yang ketiga menunjukkan bahwa kasus kerusuhan terjadi karena tidak adanya pengetahuan dan pengalaman tentang *others* yang

menjadi *encounter*-nya. Dengan demikian, yang terjadi adalah klaim-klaim kebenaran (*truth claim*), paradigma *minna-minhum, al-ana* dengan *al-akhar*. Seakan-akan kebenaran yang sama-sama diperoleh melalui penalaran dapat dipilih dengan *Aristotelian logic*, hitam-putih, padahal ia bersifat nisbi dan dapat didialogkan.

Kasus lain yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah pendirian tempat ibadah (masjid) di Rochester dan Brighton serta pendirian *Islamic Center* di San Francisco, USA (Shihab: 1999: 121-122). Kasus pendirian masjid di daerah Rochester gagal karena mendapat tantangan yang cukup keras dari masyarakat sekitar yang mayoritas termasuk kelas menengah ke bawah, sementara pendirian masjid di Brighton berhasil karena masyarakat sekitarnya yang notabene kelas menengah ke atas dengan tingkat pendidikan relatif maju dibandingkan dengan masyarakat Rochester *welcome* terhadap pendirian tempat ibadah tersebut. Sedangkan pendirian *Islamic Center* di San Francisco yang berdampingan dengan Persatuan Gereja Metodis menjadi kenyataan karena adanya pendekatan dan dialog antar panitia pembangunan dari kedua tempat ibadah tersebut. Makna dari semua ini adalah bahwa keharmonisan hubungan antar umat beragama relatif cepat terwujud ketika sebuah masyarakat cukup terdidik dan adanya komunikasi serta dialog antar berbagai pihak yang berbeda baju.

Berpijak pada beberapa kasus di atas, maka proses pendidikan mempunyai pengaruh cukup efektif dalam mengerem, untuk tidak mengatakan mengurangi dan bahkan menghentikan, berbagai kasus kerusuhan dan kekerasan masa bermuansa SARA dalam masyarakat plural seperti halnya Indonesia. Paradigma pendidikan keempat UNESCO yakni *learning to live together*, seperti telah disinggung sebelumnya, perlu segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui proses pendidikan, baik lembaga-lembaga sekolah maupun luar sekolah.

Pada pendidikan yang paling penting dilakukan adalah memberikan bekal kepada peserta didik dalam hal kerangka pikir (*mode of thought*), yakni berpikir kritis, objektif, dan rasional. Karena itu, pernyataan Fazlur Rahman tentang perlunya berfikir filosofis perlu dicermati, yakni untuk melatih berpikiran kritis-analitis dan menjadi alat intelektual untuk mengembangkan berbagai keilmuan termasuk agama (Rahman: 1982: 157-158). Berkaitan

dengan pendapat ini Amin Abdullah memberikan komentar bahwa yang dimaksud oleh Rahman tersebut adalah perlunya metode berpikir kritis-analitis dan sistematis. Ia lebih mencerminkan proses berpikir, bukan sekedar produk berpikir (Hendro: 2000: 241).

Untuk mencapai kerangka berpikir kritis-analitis seperti yang diharapkan oleh Rahman dan Amin tersebut, maka setiap komponen dalam proses pendidikan harus disiapkan secara terpadu, seperti kurikulum, tenaga pengajar, dan metode pembelajarannya. Tentu saja masih ada komponen pendidikan lain yang perlu dikaji juga, seperti peserta didik, media ataupun lingkungan pendidikan. Namun, tulisan ini mencoba membahas peran dan fungsi dari ketiga komponen yang pertama dalam pendidikan tersebut, dengan alasan bahwa ketiganya menjadi faktor penting dalam pembentukan sikap dan karakter peserta didik.

Dari segi kurikulum, sejak dini peserta didik harus diajarkan dan dibiasakan tidak hanya dengan materi pelajaran yang bersifat normatif-doktrinal-deduktif, namun juga materi yang bersifat historis-empiris-induktif. Hal ini mengindikasikan perlunya pertimbangan antara materi yang berupa teks dan konteks. Bahwa teks berisi ajaran normatif yang masih bersifat umum, sementara konteks berupa realitas empirik-faktual yang bersifat partikular. Persoalan seringkali muncul justru ketika teks berhadapan dengan realitas partikular yang heterogen tersebut. Karena itu, materi pelajaran justru harus berisi realitas yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, meskipun materi yang diberikan menurut teks-teks normatif, namun ia juga harus berisikan kasus-aksus kongkrit di masyarakat sehingga anak sadar bahwa ia hidup dalam situasi nyata yang penuh perbedaan.

Kurikulum yang diajarkan hendaknya memasukan keragaman agama dan budaya. Untuk muatan keragaman budaya, harus disadari tentang hakikat dari budaya tersebut. Bahwa ia didefinisikan sebagai berbagai kegiatan sosial dari sebuah kelompok yang dipelajari, dirasakan bersama, dan ditransmisikan. Ia merupakan bagian yang dibuat manusia dari lingkungan untuk memuaskan semua kebutuhan dasar dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan adaptasi terhadap lingkungan (Bernet: 1986: 7). Sementara itu, Chusner, Mc. Clelland, dan Safford (1993:56) menguji banyak definisi budaya dan mengidentifikasikan adanya tiga tema budaya, yaitu: 1. budaya sebagai fenomena dinamis dan dikonstruksi secara sosial; 2. budaya

sebagai suatu yang di-*share* oleh sebuah kelompok yang memutuskan melalui sebuah proses interaksi tentang ide, sikap, makna, dan hirarki apa yang dimiliki oleh kelompok tersebut; dan 3. budaya sebagai sejumlah ide yang disampaikan kepada generasi muda sebagai alat untuk menjaga generasi selanjutnya. Dengan definisi tersebut, budaya terbentuk dan muncul berdasarkan kesepakatan bersama dari suatu masyarakat. Karena itu keragaman budaya harus disadari dan diterima oleh setiap pengelola atau komunitas pendidikan, sehingga sejak dini anak sudah terbiasa dengan perbedaan dan saling menghargai perbedaan itu.

Mekipun semua kebudayaan dari semua bagian dunia yang berbeda mempunyai karakteristik umum terasuk bahasa, pola komunikasi, bentuk-bentuk ekspresi estetika, dan sistem-sistem sosial, politik, ekonomi, dan keragaman, namun ada banyak kebudayaan di dalam tiap kebudayaan. Pasch, Sparks-Langer, Gardner, Starko, dan Moody (1991) membedakan antara *monoculture* dengan *microculture*. Makrokultur didefinisikan sebagai budaya yang dominan, seperti kalau di USA ada Eropa Anglo-Saxon, sementara mikrokultur diartikan sebagai kebudayaan khas yang dimiliki oleh kelompok orang yang ada dalam negara tersebut. Kelompok orang pembentuk mikrokultur tersebut dibentuk berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan yang sama dengan budaya yang sama. Untuk kasus di Amerika, warga Amerika-Afrika, Amerika-Yahudi, dan orang-orang latin termasuk dalam kelompok mikrokultur. Sebagai bahan perbandingan, meskipun tidak persis sama dan masih *debatable*, di Indonesia ada budaya yang disepakati secara nasional, tetapi ada budaya yang tumbuh dan berkembang dalam setiap etnis yang satu sama lain berbeda.

Sebagai bangsa dengan masyarakat pluralistik secara budaya atau multikultural, di mana kelompok-kelompok ras dan etnik yang berbeda didorong untuk menjaga kebudayaannya sendiri di dalam kebudayaan yang lebih luas Indonesia mempunyai potensi, sekaligus, tantangan, untuk membina keragaman budaya tersebut agar dapat dijadikan sebagai kekuatan bangsa. Dalam hal ini, lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam mewujudkan integrasi bangsa dan pemahaman bersama tentang kemajemukan tersebut. Istilah *meltingpot* bisa digunakan untuk menggambarkan proses kelompok-kelompok etnis yang berbeda untuk menyerahkan karakteristik kebudayaan mereka menjadi warga Indonesia

baru. Pluralisme budaya menerima, mendorong, dan menghormati adanya perbedaan budaya. Sementara orang tetap menjaga identitas khususnya, mereka juga mengadopsi sifat-sifat kebudayaan yang lebih luas. Ada keseimbangan antara persamaan dan perbedaan budaya, dan warisan dilihat sebagai sumber kekuatan bangsa. Mengenai peran pendidikan dalam proses ini, Banks (1993) menyarankan bahwa tujuan utama yang diperlukan untuk merubah seluruh lingkungan pendidikan adalah agar lingkungan tersebut mengembangkan penghargaan terhadap jangkauan kelompok budaya yang luas dan menjamin kesempatan pendidikan yang sama bagi semua kelompok mikrokultur.

Berkaitan dengan peran sekolah, Cushner menyatakan bahwa sekolah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan generasi muda dari berbagai macam latar belakang. Pada saat yang sama, sekolah harus menyiapkan generasi muda dengan perspektif, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan memungkinkan mereka berinteraksi secara efektif, memuaskan kebutuhan mereka sendiri, serta bekerja dengan kelompok lain untuk mengatasi persoalan umum yang dihadapi masyarakat global yang saling bergantung satu sama lain. Pada dasarnya, para guru sendiri mau tidak mau akan menghadapi orang-orang yang tidak sama dengan mereka sendiri. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan kebudayaan, namun juga perbedaan dalam hal etnisitas, kelas, ras, agama, gender, kekhasan, dan pola hidup serta mobilitas (*Ibid*: 23). Karena itu, hal ini menuntut adanya kesadaran dan kedewasaan guru untuk menghadapi adanya keragaman di luar dirinya.

Berkaitan dengan program pendidikan yang menekankan pemahaman dan pertumbuhan interkultural, menurut Martorella, pendidikan bisa memadukan pengalaman-pengalaman berikutnya, yakni mempelajari bagaimana memperoleh tujuan, informasi yang akurat mengenai kelompok budaya lain; mengidentifikasi dan menguji pandangan (*account*) yang positif dari kelompok atau individu yang berbudaya lain; mempelajari toleransi terhadap keragaman melalui eksperimentasi di sekolah dan ruang kelas dengan kebiasaan dan praktek alternatif; menghadapi, di mana mungkin, pengalaman positif dari tangan pertama dengan kelompok budaya yang berbeda; mengembangkan perilaku empatik melalui bermain peran dan simulasi; dan mempraktekan menggunakan "kaca mata perspektif", yaitu,

dengan melihat sebuah peristiwa, kurun sejarah, atau isu melalui perspektif dari kelompok budaya lain.

Berkaitan dengan pendapat Martorella tersebut, pendidik dituntut untuk secara tepat memilih strategis pembelajaran dalam komunitas yang majemuk. Peserta didik harus dibiasakan melihat persoalan lain dari berbagai pendekatan dan perspektif. Ia harus dapat menjelaskan dan memberikan pengertian bahwa perbedaan dan keberagaman merupakan bentuk hal yang biasa dan sebuah keniscayaan, upaya penyeragaman merupakan bentuk pengingkaran terhadap *sumatullah*. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran tidak monolitik; bahwa seolah-olah kebenaran pendapat hanya miliknya, seolah pendapat pihak lain yang kebetulan berbeda pendekatan adalah keliru dan sesat. Statgei pembelajaran ini harus diterapkan ketika guru membahas persoalan keagamaan maupun persoalan budaya.

Karena peserta didik mulai dari sekolah tingkat dasar sampai pendidikan tinggi mempunyai tingkat berpikir yang berbeda, maka strategi pembelajaran yang diterapkan pun berbeda, yakni harus disesuaikan dengan tingkat pemikiran anak. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah "*khatibul al-nas 'ala qadri 'uqulihim*," berbicaralah kepada suatu kaum (bangsa, kelompok masyarakat, audiens), sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena itu, guru harus sadar dan tahu betul dengan audiens yang sedang dihadapi. Sebab, materi pelajaran dan strategi pembelajaran sebaik apapun tidak akan berhasil dan efektif jika tidak disertai dengan sumber daya manusia, yakni guru, yang memadai. Guru harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam mendidik anak dalam konteks masyarakat plural.

Akhirnya, pada bagian ini perlu dikemukakan hasil penelitian tentang pendidikan multi kultur yang menunjukkan adanya lima wilayah persoalan besar dalam pendidikan dengan konteks multi kultur (Kindsvatter: 120). Meskipun penelitian ini dilakukan dalam konteks masyarakat Amerika, namun secara substantif hasilnya dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk menghadapi persoalan serupa di Indonesia. *Pertama*, adanya keyakinan guru tentang peserta didik yang menyatakan bahwa para guru sering menganggap murid-murid Amerika-Afrika, warga Amerika keturunan Afrika, tidak mampu mencapai standar akademik yang tinggi. Sikap negatif dari guru tersebut dapat menyebabkan prestasi siswa dari warga keturunan minoritas dan kesempatan pendidikan mereka lebih rendah (Isher: 1996: 120).

Kedua, yang merupakan masalah krusial dalam pendidikan multikultural, yaitu berkaitan dengan isi dan bahan pelajaran (*subject matter*) yang digunakan. Perayaan hari-hari besar dan pahlawan-pahlawan etnis yang diselenggarakan oleh mikro-kultur mempunyai peran dan pengaruh cukup besar dalam pendidikan multikultural. Alih-alih, penekanan multikultur perlu menjadi bagian yang terus dilaksanakan dalam kurikulum reguler (Isher: 120). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perilaku peserta didik dalam menghadapi perbedaan sangat dipengaruhi oleh isi materi pelajaran yang mereka pelajari di lembaga pendidikan. Karena itu, materi yang berkaitan dengan citra realistik tentang kelompok-kelompok etnis dan ras yang ada di Amerika harus diberikan dalam bentuk yang konsisten, natural, dan terpadu.

Ketiga, strategi atau pendekatan dalam pembelajaran yang tepat dapat menjamin keberhasilan dalam pendidikan multikultural. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan metode mengajar yang tepat tidak akan mendiskripsikan suatu kelompok. Proses pembelajaran yang lebih melibatkan keaktifan belajar peserta didik yang berbeda latar belakang ternyata memberikan pengaruh positif daripada pola penyeragaman perlakuan terhadap mereka. Pola pembelajaran yang cenderung satu arah (monolitik) dari pihak guru justru menjadikan peserta didik jenuh dan kurang bisa menghargai pendapat temannya yang kebetulan berbeda dengan dirinya.

Keempat, wilayah yang berkaitan dengan *setting* pendidikan. Hal ini mengacu kepada kenyataan bahwa meskipun (di Amerika) ada segregasi sekolah-sekolah berdasarkan warna kulit, namun kebanyakan siswa yang berbeda warna kulit mendaftar di sekolah-sekolah tersebut. Bahkan muncul fenomena menarik, bahwa mereka yang sekolah dalam *setting* yang disegregasi mempunyai kemampuan rendah (Oakes: 1985). Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tidak adanya persaingan antara peserta didik, sehingga *need for achievement*-nya rendah.

Kelima, adalah pendidikan guru yang akan menangani dan berkecimpung dalam pendidikan multikultural perlu dilakukan, misalnya dengan pendidikan *pre-service* bagi mereka (Zaichner: 1992). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para guru yang menerima sedikit informasi mengenai pendidikan multikultur mengekspresikan bias-bias mereka dengan cara yang deskriminatif melalui persepsi yang mereka miliki tentang siswa-

siswa tanpa menyadari bahwa praktek yang mereka lakukan bisa menyebabkan perbedaan dalam sikap, penampilan dan prestasi siswa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk konteks Indonesia di mana masyarakatnya sangat heterogen baik dari segi agama maupun budaya, maka perlu dilakukan upaya secara terpadu dan sistematis melalui lembaga pendidikan sebagai media paling efektif untuk mengelola (*manage*) keragaman tersebut agar menjadi kekuatan. Langkah ini, pada dasarnya tidak hanya di lembaga-lembaga pendidikan, namun juga proses pendidikan di luar lembaga pendidikan, proses ini harus dilakukan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Sebab, perlakuan yang keliru terhadap kemajemukan itu dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup bangsa, terlebih dalam era global di mana batas teritorial tidak lagi menjadi hambatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antar anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang dalam satu negara.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa catatan. *Pertama*, tantangan modernitas yang begitu kompleks harus direspon secara positif dan kreatif, dalam arti perlu segera dipersiapkan sejumlah perlengkapan baik yang menyangkut *hardware* maupun *software*-nya. Perangkat keras berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan perangkat lunak terkait dengan sikap dan pola pikir. Meskipun kedua perangkat tersebut sama-sama penting, namun yang lebih esensial pada dasarnya adalah perangkat yang kedua, sebab dengan penyiapan sumber daya manusia yang handal, mampu berpikir kritis-analitis dan sistematis, maka problem yang dihadapi umat Islam dalam masyarakat majemuk relatif dapat diatasi. *Kedua*, cara yang paling efektif untuk mempersiapkan *software* tersebut adalah melalui media pendidikan. Dengan pendidikan umat Islam akan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang hidup di tengah masyarakat yang plural. *Ketiga*, perlunya merubah paradigma pendidikan yang selama ini dianut oleh umat Islam, sebab paradigma yang selama ini dijalankan ternyata lebih membentuk manusia muslim yang egois, *close-minded*, dan berorientasi pada kesalahan individual. Karena itu, menghadapi kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk ini, selain pendidikan dengan paradigma *to think, to do, dan to be*, juga perlu paradigma *to live together*. Dengan paradigma

ini, diharapkan lahir generasi umat Islam yang memiliki semangat menghormati sesama, menghargai perbedaan pendapat, menyadari eksistensi dirinya sebagai 'abdullah dan khalifatullah, dan akhirnya dapat menjadikan Islam benar-benar sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. 1996. *studi Agama: Normatif atau Historis ?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2000. *Dinamika Islam Kultural Pemetaan atas Wacana Kislaman Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- _____. 2001. "Kajian Ilmu Kalam," dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.). *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: Dirbinpertaiss Depag.
- Andito (ed.). 1992. *Atas Nama Agama Wacana dalam Dialog "bebas" Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Terj. Haidar Bangir. Bandung: Mizan.
- Azra, Azumardi. 1999. *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- _____. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Banks, J. 1993. "Multicultural Educational for Young Children: Racial and Athnic Attitudes and their Modification" dalam B. Spodek (ed). *Hanbooks of Researchon the Education of Young Children*. New York: Macmillah.
- Bennet, C.I. 1986. *Comprehenshive Multicultural Education: Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Cushner, K.A. Mc Clelland, & P. Safford. *Human Diversity and Education: An Integrative Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Djohar. 1999. *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: IKIP.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Hasan Langgulang. 1980. *Beberapa Pimikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Jabali, Fuad. 2001. "Islam Klasik dan Kajian Islam di Masa Depan". dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Ed.). *Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: Ditbinpertaiss.
- Kindstavtter, Richard, Williem Wilen, dan Margaret Ishler 1996. *Dynamics of Effective Teaching*. New York: Longman.
- Lewis, Bernard. 1987. *The Jews of Islam*. Princeton University Press.
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Oakes, J. 1985. *Keeping Track: How School Structure Inequality*. New Haven: CT. Yale University Press.
- Pranowo, M. Bambang. 1998. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Qordhawy, Yusuf. 1980. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Redfield, R. 1956. *Peasant Society and Cultur: An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago: The University of Chicago.
- Shuhab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan dan Anteve.
- Soedjadmoko. 1991. " Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Kehidupan Sosial". dalam *Jurnal ilmu Pendidikan Islam, No 2, Vol. 1*.
- Syaibani, Omar Mohammad al-Toumy. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. terj. Hasan Langgulang. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tillar, HAR. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Von Grunebaum, GE. (ed). 1955. *Unity and Variety in Muslim Civilization*. Chicago: The University of Chicago.
- Woodward, Mark R. (ed). 1999. *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.

- Zamroni. 1991. "Pembaharuan Pendidikan Menuju Mengembangkan Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam No. 2 Vol.I*.
- Zeichner, K. 1992. *Educating Teachers for Cultural Diversity*. East Lansing, MI: National Center for Research in Teacher Learning.